

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

Rexa Ananda¹, Ani Widayatsari², Harlen³

¹Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Riau

^{2,3}Dosen Magister Ilmu Ekonomi Universitas Riau Universitas Riau

E-mail : rexaananda19@gmail.com

***Abstract:** The aim is to analyze the effect of economic growth and minimum wages on employment in Riau Province. Labor absorption in this study refers to the process by which the workforce population is absorbed or trained in various economic sectors. In this study, data processing was performed using multiple linear regression analysis with the Simple Least Squares method (Ordinary Least Square/OLS). The results showed that there was a significant and positive effect between economic growth on employment and there was a significant and positive effect between the minimum wage on labor absorption.*

***Keywords:** Economic growth, minimum wage, employment*

I. PENDAHULUAN

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pencari kerja untuk melaksanakan tugas sesuai bidang yang dibutuhkan atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 Ayat 2 bahwa tenaga kerja merupakan seseorang yang mampu melakukan suatu pekerjaan agar dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau masyarakat sekitar.

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfaatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisional pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas

provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktu sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan inti dari proses pembangunan adalah: meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan

dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanti, 2009:1). Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passay dan Taufik, 1990).

Provinsi Riau memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional. Sumberdaya alam Provinsi Riau yang menjadi potensi unggulan antara lain pertambangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, industry dan jasa. Perekonomian yang terus berkembang di Riau diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup memadai sehingga tingkat pengangguran di Provinsi Riau bisa diturunkan (Bappenas). Berdasarkan data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau masih tergolong tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja. Banyaknya angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Provinsi Riau masih banyak yang belum terserap. Dengan demikian akan menyebabkan pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan.

Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang serius yang belum dapat diatasi. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai. Angkatan kerja yang tinggi memerlukan lapangan pekerjaan yang banyak, namun pada kenyataannya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan tidak tersedia. Jumlah angkatan kerja yang lebih tinggi daripada kesempatan kerja akan menimbulkan pengangguran yang lebih besar lagi.

Tabel 1 Data Jumlah Angkatan Kerja, Yang Bekerja dan Tidak Bekerja di provinsi Riau Tahun 2014 – 2021.

| Tahun | Angkatan Kerja | Yang Bekerja | Tidak Bekerja |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 2014 | 2.695.257 | 2.518.485 | 176.762 |
| 2015 | 2.771.249 | 2.554.296 | 217.053 |
| 2016 | 2.987.952 | 2.765.946 | 222.006 |
| 2017 | 3.128.108 | 2.781.021 | 184.564 |
| 2018 | 3.295.969 | 2.915.597 | 192.801 |
| 2019 | 3.296.472 | 2.953.151 | 180.661 |
| 2020 | 3.226.825 | 3.022.988 | 203.837 |
| 2021 | 3.294.616 | 3.148.947 | 145.669 |
| 2022 | 3.313.818 | 3.168.929 | 144.889 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang berada di Provinsi Riau masih masuk dalam golongan tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah angkatan kerja tersebut masih banyak yang belum terserap, terjadilah pengangguran karena lapangan kerja yang minim. Masalah tenaga kerja yang tidak terserap, lapangan kerja akan menjadi perhatian khusus dan belum dapat diatasi.

Dimensi masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun jauh lebih serius dengan penyebab yang berbeda-beda. Pada dasawarsa yang lalu, masalah pokoknya tertumpu pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru pada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan output industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara-negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat pesat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja (Vitalia, 2014:5).

Dalam hal ini pemerintah diminta untuk membuat kebijakan bagaimana lapangan kerja atau kesempatan kerja meningkat sehingga pengangguran di Provinsi Riau semakin berkurang. Kebijakan pemerintah sangat berdampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau.

Dalam hal ini Teori Klasik Adam Smith menyatakan bahwa : (1) Alokasi Sumberdaya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. (2) Penentuan tingkat kemakmuran adalah kemampuan manusia

sendiri sebagai faktor produksi. (3) Proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total dan pertumbuhan penduduk.

Teori Klasik menjelaskan bahwa didalam ekonomi pasar diasumsikan bahwa seorang pengusaha tidak dapat mempengaruhi harga (*Price taker*). Untuk memaksimalkan laba, pengusaha hanya dapat mengatur berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan (Solow 1956, dalam Arsyad, 1997). Fungsi permintaan suatu perusahaan akan tenaga kerja didasarkan pada : (1) tambahan hasil marjinal yaitu tambahan hasil output yang diproduksi pengusaha dengan menambah seorang pekerja. (2) permintaan marjinal yaitu jumlah uang akan diperoleh dengan tambahan hasil marjinal tersebut.

Tabel 2 Data Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum di Provinsi Riau pada Tahun 2014 – 2021.

2022.

| Tahun | Tenaga Kerja (Jiwa) | UMK | PDRB |
|-------|---------------------|-----------|-------------|
| 2014 | 2.518.485 | 1.700.000 | 679.395.860 |
| 2015 | 2.554.296 | 1.878.000 | 652.761.631 |
| 2016 | 2.765.946 | 2.095.000 | 681.699.030 |
| 2017 | 2.781.021 | 2.266.722 | 704.705.027 |
| 2018 | 2.915.597 | 2.464.154 | 752.263.066 |
| 2019 | 2.953.151 | 2.662.025 | 704.705.027 |
| 2020 | 3.022.988 | 2.888.563 | 728.649.985 |
| 2021 | 3.148.947 | 2.888.563 | 843.211.153 |
| 2022 | 3.168.929 | 2.938.564 | 991.589.590 |

Sumber : *Baelan Pusat Statistik Provinsi Riau*

Pada Tabel 2. Menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pada tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 hal ini disebabkan oleh karena turunnya harga minyak dunia yang mengakibatkan banyak perusahaan migas yang berada di Provinsi Riau memberhentikan karyawannya. PT. Chevron memberhentikan karyawan kurang lebih 3.000 jiwa dan PT. Bumi Siak Pusako memberhentikan karyawan sebanyak 217 jiwa. Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK disektor migas juga disebabkan karena daya beli masyarakat yang turun karena masyarakat lebih memilih untuk mengurangi konsumsinya.

PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB

dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Laju pertumbuhan yang berbeda disetiap sektor-sektor produksi menggambarkan seberapa besar sektor tersebut dapat menyerap tenaga kerja dalam suatu kondisi perekonomian, perbedaan laju pertumbuhan akan mengakibatkan pertumbuhan produktifitas disetiap sektor dan meningkatnya daya tampung sektor sektor dalam proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal tersebut pemerintah diminta untuk membuat kebijakan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran di Provinsi Riau. Kebijakan pemerintah dalam mengurangi pengangguran akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Riau. Diikuti pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi naik turun jumlah pengangguran di Provinsi Riau disebabkan oleh karena adanya kebijakan baru dari pemerintah Provinsi Riau.

Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah yang sedang berkembang dalam melakukan pembangunan di setiap daerahnya secara bertahap dan berkelanjutan. Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten / Kota. Setiap daerah memiliki sumber daya alam dan keadaan geografis yang berbeda. Perbedaan sumber daya alam dan letak geografis antar wilayah Provinsi Riau ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan memiliki kemampuan yang berbeda – beda. Pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Riau mengalami kenaikan dari tahun ketahun, pertumbuhan ekonomi yang baik yang tercermin dari PDRB mengakibatkan semakin tingginya jumlah tenaga kerja disetiap sektor sektor produksi, untuk sektor pertanian angka pertumbuhan tenaga kerja merupakan jumlah terbesar dari sektor sektor lainnya, diikuti dengan sektor perdagangan, posisi strategis dan potensi sumber daya alam serta sumber

daya manusia yang di miliki Riau menjadi alasan kenapa kedua sektor tersebut menjadi primadona perekonomian dalam proses penyerapan tenaga kerja.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha dalam rangka meningkatkan upah perkapita pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena upah berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran tenaga kerja. Peningkatan upah dapat mendorong perekonomian dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja. Upah yang mengalami kenaikan setara dengan kenaikan harga barang dan jasa yang mengakibatkan biaya hidup menjadi mahal. Maka kejadian ini akan menimbulkan angka kemiskinan semakin bertambah seluruh di Provinsi Riau.

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan Pemerintah Provinsi Riau menaikkan UMK Riau setiap tahunnya. Upah minimum Provinsi yang meningkat setiap tahunnya akan menaikkan UMK masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Kenaikan upah minimum ini dapat menyebabkan tingginya pengangguran di Provinsi Riau karena perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya akibat kenaikan upah karena perusahaan akan mengalokasikan keuangan untuk menyediakan barang dan jasa. Sebaliknya penetapan upah minimum ini salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Penetapan UMK diatur berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang pengupahan dan telah disesuaikan dengan kondisi nyata ekonomi masing-masing kabupaten / kota.

II. KERANGKA TEORI

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1, tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan

pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketentuan batas usia kerja penduduk Indonesia adalah umur 15 tahun sampai 64 tahun. Sumarsono (2003), tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah sedang bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.

Menurut Kuncoro (2002) penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula (Barthos, 2001).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (2017:1) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluar ganya atas suatu pekerjaan / jasa yang telah dan akan dilakukan.

III. METODOLOGI

Lokasi dalam penelitian ini merupakan seluruh wilayah Provinsi Riau dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang berkaitan dengan

Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum di Provinsi Riau tahun 2014 – 2022.

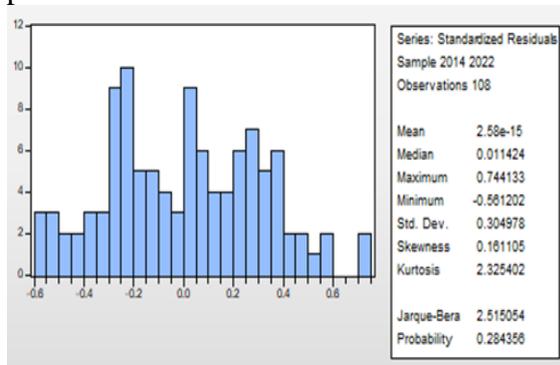
Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data kuantitatif antara lain data perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum di Provinsi Riau tahun 2014-2021. Sumber datanya dari data yang berbentuk laporan tahunan dan telah disusun serta diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan metode kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square/OLS*).

IV. ANALISA DATA

Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik terhadap model regresi yang telah diolah dengan menggunakan program Eviews 10. Uji asumsi klasik ini dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan menjadi tidak efisien dan model tidak dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Dengan dipenuhinya asumsi klasik, model OLS akan memiliki sifat ideal sesuai dengan teorema Gauss-Markov (Winarno, 2015).

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Sumber: Output EViews 10

Gambar 1 Uji Normalitas dengan uji Jarque Berra

Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua data

berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Berdasarkan Gambar 4.4 dapat diketahui bahwa nilai nilai probabilitasnya yaitu $0,284 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah berdistribusi secara normal.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas akan dilakukan dengan menggunakan *correlation matrix* untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah masing-masing variabel bebas harus memiliki nilai kurang dari 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas tidak terdapat *multikolinearitas*.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

| | LN_X1 | LN_X2 | LN_Y |
|-------|----------|----------|----------|
| LN_X1 | 1.000000 | 0.149514 | 0.755320 |
| LN_X2 | 0.149514 | 1.000000 | 0.110145 |
| LN_Y | 0.755320 | 0.110145 | 1.000000 |

Sumber: Output EViews 10

Hubungan korelasi antara variabel memiliki nilai sebesar < 80 . Hasil korelasi tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam model penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

| | Value | df | Probability |
|------------------|----------|----|-------------|
| Likelihood ratio | 160.1563 | 12 | 1.0000 |

| LR test summary: | | |
|-------------------|-----------|-----|
| | Value | df |
| Restricted LogL | -24.49148 | 105 |
| Unrestricted LogL | 55.58668 | 105 |

Sumber: Output EViews 10

Dari hasil pengujian pada tabel diatas, berdasarkan nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Nilai Probability Likelihood ratio $1,0000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil regresi data panel dan uji statistik disajikan pada Tabel berikut ini: Tabel 5 Hasil Uji Statistik

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI RIAU

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 4.211805 | 0.823002 | 5.117611 | 0.0000 |
| LN_X1 | 0.293853 | 0.118548 | 2.478758 | 0.0150 |
| LN_X2 | 0.338900 | 0.052304 | 6.479390 | 0.0000 |

| Effects Specification | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------|--|
| Cross-section fixed (dummy variables) | | | | |
| R-squared | 0.981591 | Mean dependent var | 12.28334 | |
| Adjusted R-squared | 0.979045 | S.D. dependent var | 0.465367 | |
| S.E. of regression | 0.067367 | Akaike info criterion | -2.436915 | |
| Sum squared resid | 0.426595 | Schwarz criterion | -2.089231 | |
| Log likelihood | 145.5934 | Hannan-Quinn criter. | -2.295942 | |
| F-statistic | 385.5448 | Durbin-Watson stat | 1.493958 | |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Sumber: Output EViews 10

Statistik pada Tabel 5 dapat dijelaskan sebagai berikut ini.

Uji Signifikansi Parameter Secara Serentak (Uji Statistik F)

Uji Statistik secara serentak ditunjukkan oleh perbandingan nilai F hitung dengan F tabel atau dengan melihat nilai probabilitas F hitung. F tabel dengan $df = (k-1, n-k)$, dengan derajat kepercayaan sebesar 95 persen. Berdasarkan hasil analisis EViews Tabel 5 diperoleh nilai F hitung sebesar 385.5448 dan probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf nyata 5% maka uji F dinyatakan signifikan, P-value (0.000000) $< \alpha = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Kedua variabel pertumbuhan PDRB dan upah minimum secara bersama-sama dapat menjelaskan penyerapan angkatan kerja di Provinsi Riau.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model regresi yang dapat dilihat dari nilai R Square. Dari perhitungan nilai R Square pada Tabel 5.8 adalah 0.981591. Hal ini berarti 98,15 persen penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen di atas, sedangkan sisanya yaitu 1,95 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (critical value) pada $df = (n-k)$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen termasuk konstanta. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari tiap-tiap variabel bebas (PDRB dan upah minimum) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja). Apabila nilai p-value (probabilitas) $<$ tingkat signifikansi 5% atau 10% dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil olah data Eviews pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki t-hitung sebesar 2.478758 dan probabilitas sebesar 0.0150. Dengan tingkat keyakinan 95%, 90% ($\alpha = 5\%, 10\%$) maka variabel pertumbuhan ekonomi secara individu signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Nilai koefisien regresi 0,2938 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi hipotesis bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja diterima.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil olah data Eviews pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki t-hitung sebesar 6.479390 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dengan tingkat keyakinan 95%, 90% ($\alpha = 5\%, 10\%$) maka variabel upah minimum secara individu signifikan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. Nilai koefisien regresi 0,3389 menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Jadi hipotesis bahwa upah minimum berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja diterima.

Adapun interpretasi dari persamaan regresi dan pembahasannya adalah:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan tenaga kerja

Nilai konstanta sebesar 4,211 menunjukkan bahwa jika variabel- variabel independen dianggap konstan, maka nilai rata-rata penyerapan anggaran adalah sebesar 4,211 %. Angka sebesar itu dipengaruhi oleh variabel- variabel lain di luar model seperti Kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Misalnya, kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi iklim investasi, insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, atau kebijakan imigrasi yang memengaruhi ketersediaan tenaga kerja asing. Demografi: Struktur demografi suatu populasi juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Misalnya, jika terdapat pertumbuhan penduduk yang cepat atau generasi besar yang masuk ke usia kerja, maka penyerapan tenaga kerja akan menjadi faktor penting. Di sisi lain, populasi yang menua dapat menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja. Teknologi dan otomatisasi: Perkembangan teknologi dan otomatisasi dapat berdampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja. Jika suatu industri mengadopsi teknologi yang memungkinkan otomatisasi proses produksi, maka perusahaan mungkin membutuhkan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga dapat menciptakan peluang baru dan menghasilkan permintaan akan keterampilan baru yang diperlukan oleh pasar tenaga kerja. Kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja: Tingkat kualifikasi dan keterampilan tenaga kerja dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Jika terdapat kesenjangan antara kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja, maka dapat terjadi kesulitan dalam penyerapan tenaga kerja. Keterampilan yang relevan dengan pasar kerja saat ini, seperti keahlian dalam teknologi informasi, dapat meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja. Faktor geografis dan regional: Faktor-faktor geografis dan regional juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Misalnya, aksesibilitas wilayah, infrastruktur yang berkembang, dan adanya pusat industri

atau kegiatan ekonomi tertentu dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga kerja

Koefisien variabel dari PDRB adalah 0.346744 dan nilai ini adalah positif, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja Propinsi Riau secara signifikan. Jika pertumbuhan ekonomi naik 1%, maka penyerapan tenaga kerja naik menjadi 0,2938 %.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonominya maka semakin rendah tingkat pengangguran dan semakin tinggi tingkat penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari (2013) yang menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwasannya terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2014-2022. Nilai koefisien regresi yang positif menandakan apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti kenaikan angka penyerapan tenaga kerja. Dan juga terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara upah minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2014-2022. Nilai koefisien regresi yang positif menandakan apabila terjadi kenaikan upah minimum akan diikuti kenaikan angka penyerapan tenaga kerja.

Saran

Berkaitan dengan upah minimum, Pemerintah Provinsi Riau harus menetapkan kebijakan upah secara tepat untuk meningkatkan kehidupan yang

layak khususnya bagi para pekerja tetapi juga tanpa merugikan kelangsungan hidup perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya memperpanjang periode penelitian. tidak hanya periode 9 tahun agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat dan memperluas analisis dengan menambah faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja diantaranya: investasi, tingkat pendidikan dan lain-lain

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aryani (2014). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri di Kota Madiun Tahun 2004 – 2014.” Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (20014-2021). Riau Dalam Angka, diambil Oktober 2022, dari <https://www.bps.go.id>
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). “Ekonomi Pembangunan Teori Masalah dan Kebijakan Edisi Keempat”. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw. (2012). “ Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Asia Volume 2”. Salemba Empat, Jakarta.
- Rochmani, Purwaningsih, Suryantoro. (2016). “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.16. No.2, 51-62.
- Sandika, Maulida dan Setiawan. (2014) . “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan”. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Simanjuntak, Payaman. (2001). “Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia”. Penerbit FE UI, Jakarta.
- Sobita, Suparta. (2014). “Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Lampung”. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.3 No.2, 36 – 52.
- Sukirno, S. (2001). Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sulistiawati, Rini. (2012). “Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia”. Jurnal Ekonomi. Vol.8. No.3. Hal 195-211.
- Wicaksono. (2012). “Analisis Pengaruh PDB Sektor Industri, Upah Riil dan Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Sedang dan Besar di Indonesia Tahun 1990 – 2000”. Jurnal Ekonomi. 2011.